



PERSEPSI PEREMPUAN MENGENAI FENOMENA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA NGADAS KABUPATEN MALANG

Syakira Syafiqya Tsabita Putri Hartono¹, Muchammad Miqdad², Syahara Bhatari Alamsyah³, Sri Zul Chairiyah⁴

¹Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia.
Email: syakira20001@mail.unpad.ac.id

²Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia.
Email: muchammad20002@mail.unpad.ac.id

³Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia.
Email: syahara20001@mail.unpad.ac.id

⁴Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia.
Email: srizul_chairiyah@yahoo.co.id

Corresponding Author: Syakira Syafiqya Tsabita Putri Hartono

ABSTRACT

Women's perception and participation in political phenomena in Indonesia still needs to be encouraged, bearing in mind the patriarchal culture which has an impact on the minimal role of women in politics and as citizens. Elections are a means of participating in politics by becoming voters or participants. Elections are a tool for everyone, including women. The smallest unit of election organizers is the village. One of the villages with a unique political phenomenon is Ngadas Village in Malang Regency, where the village head also plays the role of customary head. However, what is interesting is the role and views of women on all the political dynamics that occur in Ngadas Village. Using descriptive qualitative methods, the research will examine in depth the perceptions and roles of women in Ngadas Village regarding the political phenomena that occur. Interview and observation techniques were used to collect data and obtain information through related documentation or literature. The results of the study show that the perceptions and roles of women in Ngadas Village tend to be passive in selecting village heads. Participation is carried out only as a form of handing over voting rights to give legitimacy to those in power.

Keywords: Perception, Participation, Women, Ngadas, Pilkades

ABSTRAK

Persepsi dan partisipasi perempuan dalam fenomena politik di Indonesia masih perlu didorong pelaksanaannya, mengingat kultur budaya patriarki yang telah mengakar kuat terkadang berdampak pada mengecilkan peran perempuan dalam ruang lingkup politik dan perannya

sebagai warga negara. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi politik dengan menjadi pemilih ataupun peserta. Bagaimanapun juga pemilu menjadi sarana bagi seluruh masyarakat tak terkecuali perempuan. Unit terkecil dari pelaksanaan pemilihan umum adalah desa, yaitu untuk memilih kepala desa. Salah satu desa dengan keunikan fenomena politiknya adalah Desa Ngadas di Kabupaten Malang, di mana kepala desa sekaligus berperan sebagai kepala adat. Namun, yang menjadi menarik adalah peran dan pandangan perempuan terkait seluruh dinamika politik yang terjadi di Desa Ngadas. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian akan mencoba mengkaji secara mendalam terkait persepsi dan peran perempuan Desa Ngadas terkait fenomena politik yang terjadi. Teknik wawancara, observasi dilakukan untuk mengumpulkan data serta dikolaborasikan dengan perolehan informasi melalui dokumentasi atau literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dan peran perempuan di Desa Ngadas yang cenderung pasif dalam pemilihan kepala desa, partisipasi yang dilakukan hanya sebagai bentuk penyerahan hak suara agar dapat memberikan legitimasi kepada yang berkuasa.

Kata Kunci: Persepsi, Partisipasi, Perempuan, Ngadas, Pilkada.

PENDAHULUAN

Pemilu lima tahun sekali di negara Indonesia dianggap sebagai pesta demokrasi rakyat, karena tujuan dari pemilihan umum pada dasarnya ditujukan demi kebajikan rakyat itu sendiri. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perlunya partisipasi politik masyarakat untuk ikut menentukan jalannya proses politik di Indonesia. Partisipasi politik merupakan aktivitas individu atau sekumpulan individu untuk turut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan politik, dimulai dari cara sederhana yakni memilih pemimpin di tingkat administratif baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan pemilihan ini juga mencakup pada peran aktif rakyat dalam mengawal para pimpinan negara dalam merumuskan regulasi, berinteraksi dengan pemimpin, menghadiri forum-forum komunikasi atau diskusi, menjadi bagian dari suatu partai politik ataupun gerakan sosial, dsb. (Budiarjo, 2008). Partisipasi politik ini pada dasarnya muncul dari inisiatif individu itu sendiri, tidak bersifat memaksa namun secara sukarela. Tiap-tiap individu yang berpartisipasi aktif dalam politik ini setidaknya merasa yakin bahwa tindakan atau keputusan mereka untuk berpartisipasi akan memberikan dampak atau sekurang-kurangnya diketahui oleh para pemegang kekuasaan. Selain itu, individu yang memutuskan untuk melakukan tindakan partisipasi politik pada dasarnya yakin bahwa tindakan mereka akan memiliki *political efficacy*.

Politik merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari manusia, hal tersebut memang melekat dari manusia sejak lahir. Politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena kebutuhan manusia memiliki sifat untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun kelompoknya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebutlah manusia kemudian menjalin interaksi dengan manusia lain, untuk mempermudah mencapai tujuannya. Terkadang interaksi tersebut juga diwarnai dengan berbagai macam, strategi, cara, dan upaya yang sarat akan nilai politik. Hakikatnya manusia akan mencoba untuk menguasai orang lain, untuk mendapatkan suatu hal. Khususnya pada saat bernegosiasi, manusia akan saling menekankan pengaruhnya, dengan menggunakan cara yang beragam. Hal tersebut sangat dekat dengan kalimat yang dikemukakan

oleh Aristoteles, bahwa manusia itu adalah *zoon politicon* (Mali, 2019). Secara sadar maupun tidak sadar, mereka selalu berpolitik untuk mencapai, tujuan-tujuannya.

Setiap manusia dalam berpolitik selalu berpedoman atau nilai tertentu ada nilai yang dianutnya, hal tersebut berdasarkan kepada pengetahuan dan karakter masing-masing. Pandangan politik manusia selalu terkait dengan ideologi seseorang, ideologi tersebut akan menjadi landasan bergerak. Politik sendiri apabila mengutip buku Aristoteles yang berjudul filsafat politik, mengemukakan bahwa politik adalah, usaha-usaha yang dilakukan oleh warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Setiap manusia juga memiliki pandangnya masing-masing dalam menjalankan politik. Artinya pandangan politik manusia merupakan nilai atau ideologi yang dianut oleh manusia untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Sedangkan nilai yang dianut manusia selalu mempengaruhi perbuatannya (Stefen, Tejawati, & Parwati, 2022).

Pasca berkembangnya konsep perbedaan gender, manusia mulai membedakan kelompoknya berdasarkan gender. Perempuan merupakan kelompok gender yang dibedakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Berdasarkan biologi perempuan mengalami beberapa fase yang berbeda dengan laki-laki, perempuan memiliki fase menstruasi dan melahirkan, fase yang tidak mungkin dijalani oleh laki-laki secara alamiah (Nurbayan & Tahir, 2019). Namun perbedaan gender tersebut seringkali dijadikan alat untuk menekan kekuasaan perempuan, hal tersebut berdasarkan perbedaan fase yang dianggap kelemahan bagi masyarakat. Sehingga perempuan harus menerima kenyataan bahwa dalam konstruk sosial perempuan sering dijadikan objek kekuasaan, sehingga perempuan dirasa mendapatkan ruang berbeda dengan kelompok laki-laki.

Dalam konstruksi sosial saat ini terjadi perbedaan kesempatan antara kaum laki-laki dengan perempuan, laki-laki lebih mudah dalam menjalankan partisipasi politik, karena konstruk sosial yang mendukung, dan fisik yang mumpuni. Sedangkan perempuan mengalami berbagai macam hambatan, baik itu berasal dari sosial budaya, agama, dan politik (Wahid, 2014). Sepakat dengan hal tersebut Saidah dan Khatimah berpendapat bahwa perempuan mengalami berbagai macam hambatan yang berujung kepada ketidakadilan. Sehingga perempuan saat ini rentan terdampak, stereotip, marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan seksual, hal ini diakibatkan dominasi kontrol laki-laki di masyarakat (Saidah, 2003). Kuatnya dominasi kontrol laki-laki ini menyebabkan perempuan harus berada pada ruang isolasi, yang membebani perempuan dengan kerja kawasan domestik (rumah tangga). Sedangkan laki-laki bebas untuk mengakses ruang-ruang publik, karena kebebasan mereka dari beban kerja domestik (Wahid, 2014). Partisipasi politik perempuan harus didorong bersama, baik itu dari kesadaran kaum laki-laki, maupun kesadaran dari perempuan itu sendiri. Perempuan akan mudah untuk memperjuangkan kebutuhan politiknya, apabila mendapatkan dukungan dari seluruh pihak, termasuk partisipasi perempuan itu sendiri.

Salah satu desa yang memiliki fenomena politik yang unik untuk dikaji adalah Desa Ngadas di Kabupaten Malang. Desa ini cukup berbeda dengan desa lainnya yang ada di Indonesia karena keunikannya sebagai desa wisata dan desa yang masih kental dengan adat

istiadatnya. Desa Ngadas merupakan desa yang ditempati oleh suku Tengger dan pemukimannya terletak di kaki gunung Bromo. Proses politik di Desa Ngadas pada dasarnya sama dengan desa lainnya, yaitu dipimpin oleh seorang kepala desa yang terpilih melalui pemilihan. Namun, dalam praktiknya, kepala desa sendiri memegang jabatan lain yaitu sebagai kepala adat yang memimpin proses adat istiadat di desa tersebut. Sehingga secara garisbesar, kepala desa memainkan peranan yang krusial dalam dinamika politik di Desa Ngadas. Hanya saja secara rentang historis, posisi kepala desa di Ngadas selalu diisi oleh penduduk asli yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana peran perempuan penduduk Desa Ngadas dalam kehidupan bermasyarakat khususnya yang menyangkut kepentingan-kepentingan politis.

Penting untuk memahami bahwa posisi dan partisipasi perempuan di desa sangat penting untuk memastikan bahwa inklusivitas tercipta di lingkungan terkecil. Naqiyah (2005) menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek penting untuk melihat partisipasi politik perempuan, yaitu: 1) akses; 2) kontrol; dan 3) suara perempuan dalam perumusan kebijakan. Maka dari itu, dengan menjadikan Desa Ngadas di Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian, peneliti akan berfokus terhadap poin-poin berikut: 1) Akses perempuan terhadap agenda politik desa Ngadas (agenda pilkades); 2) Partisipasi perempuan terhadap kontrol politik (keikutsertaan perempuan dalam pilkades atau mencalonkan diri sebagai kades); dan 3) Suara perempuan dalam proses pembuatan kebijakan (keikutsertaan perempuan dalam musyawarah desa atau keikutsertaan dalam pengambilan keputusan di ruang lingkup desa).

Apabila mengacu pada permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, setidaknya terdapat dua pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana persepsi perempuan Desa Ngadas dalam fenomena politik khususnya terkait pemilihan Kepala Desa?” dan “Bagaimana bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh perempuan Desa Ngadas dalam dinamika politik desa khususnya agenda pemilihan kepala desa?”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah yang berorientasi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan serta kegunaan peneliti. Keilmiahan penelitian dapat diperoleh jika dalam prosesnya menjunjung kaidah-kaidah keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu: 1) penelitian dilakukan untuk melakukan penemuan akan hal-hal baru; 2) penelitian dilakukan untuk membuktikan suatu asumsi atau hipotesis peneliti; dan 3) penelitian dilakukan untuk mengembangkan gagasan atau fenomena yang sebelumnya telah diketahui, sehingga pendalaman dapat dilakukan (Sugiyono, 2017). Maka dari itu, metode memainkan peranan yang krusial dalam memastikan peneliti dapat memperoleh data atau hasil penelitian yang memenuhi tujuan dilaksanakannya penelitian. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam memperoleh data penelitian, namun dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian kualitatif pada dasarnya dapat dipahami dari beragam perspektif, seperti Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah

prosedur penelitian yang hasilnya berbentuk data deksriptif berupa kata-kata atau tulisan yang berasal dari seseorang atau fenomena yang dapat diamati. Dengan pendefinisian ini secara garis besar dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasil dari prosesnya dijelaskan melalui bentuk tulisan atau kata-kata, bukan angka. Penelitian kualitatif juga cenderung menekankan hasil pada kondisi fenomena yang sifatnya ilmiah, sehingga generalisasi hasil penelitian tidak memainkan peranan yang dominan. Sedangkan pendekatan deskriptif dilakukan untuk memberikan pendalaman atau gambaran secara rinci, terorganisir, dan akurat terkait fenomena yang akan dikaji.

Menurut Lofland (Moleong, 2006) penelitian kualitatif memiliki sumber data pokok dengan berbentuk kata-kata serta tindakan dan dengan dilengkapi oleh beberapa data lainnya seperti dokumen, dan sebagainya. Dengan demikian, jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

1) Observasi

Penelitian yang bertujuan untuk mengamati, mempelajari tingkah laku atau kebiasaan, sebuah program atau sistem kerja, dan mengamati fenomena atau gejala tertentu yang terjadi di suatu lingkungan atau konstruk sosial membutuhkan teknik observasi dalam memperoleh data. Observasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, di antaranya: partisipatif; terus terang dan tersamar; dan tidak terstruktur (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini digunakan observasi tidak terstruktur, di mana tidak ada acuan baku terkait hal-hal yang akan diobservasi, sehingga peneliti mengamati secara langsung dan dapat dengan bebas mengeksplor objek yang diobservasi.

2) Wawancara

Wawancara secara sederhana dapat dipahami sebagai proses penyaluran atau pertukaran informasi antara dua orang (peneliti dan informan) yang dari proses tersebut dapat diperoleh makna, pandangan, asumsi terkait topik atau fenomena yang dikaji (Esterberg, 2002). Proses wawancara ini dilakukan ketika peneliti memerlukan data yang tidak dapat diperoleh melalui proses observasi karena perlu pandangan atau perspektif dari pihak lain selain peneliti.

b. Data Sekunder

1) Studi Literatur

Studi literatur digunakan dalam penelitian untuk memperkaya pengumpulan data dengan memanfaatkan Pustaka, literatur, bahan bacaan, serta riset-riset dari penelitian sebelumnya yang sekiranya mampu memperkaya hasil penelitian. Sehingga dengan ini, peneliti mampu melakukan pendalaman akan penelitian yang dikaji.

2) Dokumentasi

Kredibilitas penelitian dapat dinilai berdasarkan kelengkapan data yang diperoleh. Untuk melakukan pendalaman data, dokumentasi atau dokumen biasanya digunakan untuk melengkapi hasil temuan berdasarkan proses wawancara dan observasi. Dokumen

sendiri dapat dipahami sebagai rekam jejak, atau catatan yang berasal dari suatu peristiwa, atau dapat berupa peraturan serta laporan.

Menurut Miles dan Huberman (1984), untuk melakukan pengolahan data terdapat tiga tahapan yang perlu dilakukan, yaitu: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian Data; dan 3) Penarikan Kesimpulan. Reduksi data dapat dipahami sebagai proses peringkasan poin-poin yang diperoleh selama penelitian berlangsung, dengan hanya berfokus pada poin atau temuan yang penting dan sejalan dengan penelitian yang dikaji. Setelah proses reduksi data dilakukan, peneliti kemudian akan masuk ke dalam proses penyajian data, di mana dalam proses ini, hasil temuan akan dipaparkan dan ditemukan keterkaitannya baik dengan antar temuan penelitian atau dengan teori. Terakhir, proses penarikan kesimpulan dilakukan untuk memberikan argumentasi, paparan hasil penelitian yang didasarkan pada data, dan rumusan masalah. Sehingga berdasarkan tahapan ini peneliti mampu mengetahui apakah masalah yang dikaji dapat terjawab atau berkembang berdasarkan temuan penelitian (Sugiyono, 2017).

Terakhir, uji validitas data dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian valid sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Teknik uji realibilitas dan validitas ini dilakukan melalui teknik triangulasi, yang dibagi ke dalam tiga jenis: triangulasi data, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. Penelitian ini berfokus dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Hal ini dilakukan dengan membandingkan dan mengkomparasikan sumber-sumber data penelitian sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dan menjadikan penelitian lebih kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi atau dalam bahasa Inggris ditulis *participate*, berasal dari bahasa Latin yaitu *pars* dan *capere*. *Pars* artinya bagian dan *capere* artinya mengambil, dua kata tersebut apabila digabungkan menghasilkan makna “mengambil bagian”. Partisipasi secara bahasa artinya adalah mengambil bagian atau peranan, baik itu dalam aktifitas ataupun kegiatan apapun, termasuk di ranah politik dan kebijakan (Widiyaningrum, 2020). Sedangkan partisipasi politik sendiri adalah kegiatan yang dijalankan oleh warga negara dalam keterlibatannya untuk mengambil keputusan, dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik (Sastroatmojo, 1995). Dalam hal ini tujuan utama partisipasi politik adalah untuk merubah suatu kebijakan publik. Kebijakan publik ini memang berfungsi untuk mengatur masyarakat, sehingga masyarakat sendiri lah yang harus memberikan pendapatnya tentang sebuah kebijakan, agar sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. Selain itu partisipasi politik juga bisa didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok, untuk ikut serta berkegiatan politik secara aktif, baik itu ditandai dengan memilih pemimpin, kemudian dilanjutkan dengan ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan publik (Setiadi dan Kolip, 2013). Ikut memilih pemimpin dalam sebuah wilayah adalah satu bentuk partisipasi politik paling awal, karena bagaimanapun juga, pilihan yang kita pilih kedepannya akan mempengaruhi arah kebijakan politik. Partisipasi politik ini merupakan kegiatan yang sifatnya sukarela, dengan tujuan kepentingan umum. Setiap warga negara secara sukarela harus mementingkan kepentingan umum, termasuk dengan melakukan partisipasi politik. Samuel

Huntington, juga mengemukakan pendapat yang serupa mengenai partisipasi politik. Bahwa tujuan utama partisipasi politik ini adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Namun Huntington menjelaskan lebih luas tentang bentuk partisipasi politik, bahwa partisipasi politik ini bukan hanya dikerjakan melalui aspek legal dan formal saja. Tetapi diluar dari hal tersebut juga bisa dilakukan, seperti dengan melakukan hal yang spontan, sporadis, baik itu melalui kekerasan ataupun secara damai. Artinya partisipasi politik ini bukan hanya dibatasi pada aspek legal, seperti pemilu, musyawarah dan lainnya. Tetapi melalui bentuk-bentuk ilegal yang sporadis, dan dilakukan melalui kekerasan juga mampu untuk menekan pemerintah, sehingga mampu mempengaruhi sebuah kebijakan (Widiyaningrum, 2020).

Partisipasi politik ini merupakan sebuah ciri yang terpenting dari negara demokrasi. Bagaimanapun juga kedaulatan berada di tangan rakyat, bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Sehingga rakyatlah yang harus bertindak lebih untuk menentukan keputusan pemerintah. Melalui berbagai macam bentuk partisipasi politik inilah, rakyat menjalankan roda demokrasi. Partisipasi politik ini memiliki empat fungsi, menurut Lane. **Pertama** partisipasi politik digunakan untuk menekan kebutuhan ekologis. **Kedua** partisipasi politik berfungsi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sosial. **Ketiga** berfungsi untuk mendapatkan nilai-nilai khusus. **Keempat** partisipasi politik berfungsi untuk memenuhi kepentingan alam bawah sadar dan psikologis (Nurbayan & Tahir, 2019). Maka penting pemerintah untuk mengawal kegiatan partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi politik juga merupakan hak yang melekat bagi seluruh warga negara tidak terbatas pada, perbedaan kelas sosial maupun gender. Sehingga akan menjadi masalah apabila pemerintah, melakukan pembatasan terhadap partisipasi politik dengan perbedaan kelas sosial maupun gender. Karena banyak kasus yang menyebabkan perempuan mengalami hambatan dalam menjalankan partisipasi politik, baik itu tekanan dari budaya, adat istiadat, maupun agama. Permasalahan tersebutlah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk diselesaikan.

Partisipasi politik kalangan perempuan menjadi perhatian di era modern ini, mengingat masih cukup rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam agenda dan lembaga politik. Bentuk partisipasi perempuan dalam politik sebenarnya dapat diakomodasi dalam banyak hal, mulai dari ruang lingkup besar hingga ruang lingkup terkecil seperti politik desa. Perempuan yang tinggal di desa terkadang berhadapan dengan banyak tantangan dan kendala untuk melakukan partisipasi dalam bidang politik, karena beberapa hal yang melatarbelakanginya. Misal, perempuan yang tinggal di pedesaan cenderung pasif akan hal-hal politis karena kurangnya pemahaman akan politik dan pentingnya berpartisipasi. Namun, pola patriarki yang masih mengakar kuat di desa juga menjadi salah satu alasan utama mengapa perempuan di desa cukup sulit mendapat akses ke hal-hal politis. Musyawarah warga, pengambilan keputusan, mayoritas dilakukan oleh laki-laki atau kepala keluarga, sehingga seringkali perempuan terpinggirkan dalam prosesnya dan begitu pula dengan output kebijakan yang diterapkan, tidak berpihak atau mementingkan posisi perempuan.

Politik sangat dengan pengambilan keputusan, khususnya dalam pengambilan sikap politik seseorang. Pengambilan keputusan merupakan proses untuk memilih alternatif dengan

mempertimbangkan metode yang efisien sesuai dengan keadaan, proses pemilihan alternatif tersebut merupakan cara untuk menyelesaikan suatu masalah (Salusu, 2016). Sejalan dengan pemikiran Salusu, Usman dalam bukunya yang berjudul ‘Manajemen Teori, Praktek dan Riset’ bahwa pengambilan keputusan merupakan proses untuk memilih sejumlah alternatif (Usman, 2016). Setiap keputusan yang diambil akan mendorong terjadinya tindakan dan perubahan.

Tentunya posisi, peran dan fungsi akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan, sehingga posisi-posisi akan memepermudah seseorang dalam melakukan pengambilan keputusan (Hanafie & Azmy, 2018). Sehingga dalam konstruk sosial saat ini mereka yang memiliki posisi yang penting akan lebih mudah mempengaruhi pengambilan keputusan. Apabila mengambil contoh di tingkat desa, maka peran kepala desa akan sangat penting dalam pengambilan keputusan. Dibandingkan dengan warga biasa yang mungkin harus menempuh langkah panjang, agar kepala desa mau untuk mendengarkan keputusan warga tersebut. Terkecuali kepala desa yang disebut sering mendengarkan keluhan warganya, sehingga kepala desa tersebut akan menentukan keputusan berdasarkan kebutuhan warganya.

Pilkades merupakan kegiatan politik yang terjadi di desa, yang menunjukkan bahwa masyarakat di tingkat desa sudah menjalankan politik dari awal. Desa sebagai salah satu unit terkecil sistem pemerintahan di Indonesia sejatinya memiliki tradisi tersendiri dalam menyeleksi pimpinanya. Namun tradisis tersebut seiring berjalanya waktu berubah, menjadi pemilihan kepala desa, yang diselenggarakan dengan pemungutan suara (Yuningsih & Subekti, 2016). Sejatinya pandangan mengenai pemilihan kepala desa ini meruakan sebuah rujukan mengenai masyarakat yang demokratis. Dimana nilai-nilai gotong royong dan musyawarah masih dipegang teguh dalam proses pemilihan. Calon kepala desa yang diajukan juga terkadang mereka memang memiliki kedekatan yang lebih dengan masyarakat, berbeda dengan tingkatan pemilihan yang lebih besar, dimana warga jarang mengenali calon secara dekat (Widjaj, 2008). Sehingga desa secara resmi menjadi sebuah entitas demokratis, yang mampu menjalankan kekuatan otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahannya atas kehendak dan kebutuhan warganya sendiri.

Pemilihan kepala desa merupakan ajang demokrasi bagi masyarakat desa, untuk terjun secara langsung melaksanakan pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa bukan hanya ajang pemiliahn semata, tetapi dibalik itu banyak dinamika politik yang terjadi disana. Seringkali pemilihan kepala desa ditandai dikaitkan dengan perebutan kehormatan antar kelompok tertentu, sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan di masyarakat (Wastiono, 1993). Studi mengenai pemilihan kepala desa ini memang serang dilakukan di Indonesia, salah satunya studi yang dilakukan oleh Prijono Tjiptoherjanto dan Yumiko Prijono tahun 1983, mengungkapkan bahwa pemilihan kepala desa banyak diwarnai dengan permainan elit politik, selain itu banyak kepentingan yang dipertaruhkan oleh elit disana untuk menjaga posisi kepala desa. Sehingga bisa dianggap pemilihan kepala desa ini menjadi salah satu kemunduran demokrasi di Indonesia (Yuningsih & Subekti, 2016). Kedua penelitian tersebut sama-sama mengungkap adanya kemunduran nilai-nilai musyawarah dan gotong royong yang terjadi di desa, hal itu dikarenakan adanya perubahan politik, sosial, ekonomi, serta perubahan

peran kepala desa, yang sudah tidak lagi menjadi pengayom rakyat, melainkan banyak kepentingan pragmatis disana.

Pemilihan kepala desa menjadi ajang demokras yang sangat merakyat, dimana ajang demokrasi tersebut juga bisa menjadi langkah awal sekaligus sarana melatih masyarakat, khususnya bagi kelompok perempuan (Garis & Trisnia, 2021). Namun seringkali partisipasi perempuan pada pemilihan kepala desa, hanya dianggap sebagai ikut-ikutan saja. Sejatinya perempuan tidak dilibatkan secara penuh dalam pemilihan, karena mereka terkadang banyak dipengaruhi oleh kelompok dominan khususnya di keluarga. Kelompok dominan tersebut adalah kepala keluarga atau bapak di keluarga sendiri. Sehingga kesanya perempuan hanya menjadi pengikut saja dalam politik bukan sebagai penentu kepentingan politiknya sendiri (Yuningsih & Subekti, 2016). Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggali informasi terkait fenomena partisipasi perempuan dalam pemilihan Kepala Desa Nagadas Kabupaten Malang. Desa Ngadas ini merupakan salah satu desa adat yang berada pada wilayah Adat Tengger. Posisi kepala desa di Desa Nagadas ini sendiri merupakan bagian dari kepala desa sekaligus kepala adat. Sehingga pasti terdapat keunikan tersendiri dalam proses pemilihan kepala desanya, dengan segala kearifan lokal, dan adat istiadat yang terus menerus dipelihara, apakah hal tersebut juga berdampak kepada partisipasi perempuan disana, dalam menentukan pilihan politiknya untuk memilih kepala desa.

Memahami Karakteristik Perempuan di Desa Ngadas

Seiring berkembangnya zaman, perubahan sistem politik dan dinamika politik yang ada di Indonesia pun mengalami banyak perubahan, dimana dengan adanya perubahan ini memberikan beberapa pengaruh terhadap masyarakat agar mereka dapat menerapkan mekanisme politik secara lebih demokratis. Pada pembahasan kali ini, Desa Ngadas yang termasuk kedalam konteks politik Desa tentu mekanisme politik tergambar secara jelas pada pemilihan kepala desa ataupun pemilihan lain seperti pilpres, pilleg, dan lainnya yang juga turut melibatkan warga Desa Ngadas secara umum. Pada tahun 2013, Supriasih adalah perempuan yang berhasil maju sebagai calon Kepala Desa Ngadas yang menjadi lawan Mujianto pada pemilihan kepala Desa Ngadas, hal ini tentu menarik untuk diteliti karena menurut keterangan dari warga di Desa Ngadas, jarang bahkan hampir tidak ada kandidat perempuan yang ingin maju di kontestasi politik pemilihan kepala desa tersebut dikarenakan dari tahun ke tahun selalu laki-laki yang menjabat sebagai kepala desa, diantaranya yaitu:

Nama	Masa Jabatan
Ngateno	6 Tahun
P. Legisah	9 Tahun 5 Bulan
P. Bromo Rejo	20 Tahun
Asmokerto	25 Tahun
P. Ratmojo	4 Tahun
P. Purnomo Mujiraharjo	21 Tahun
P. Mulyadi Bromo Putro	8 Tahun

P. Samsuri	1 Tahun
Kartono Noto Raharjo	14 Tahun
Mujianto Mugi Raharjo	2013-Sekarang

Untuk mengetahui persepsi perempuan Desa Ngadas terhadap pemilihan kepala desa, dapat terlihat dari beberapa faktor seperti pendidikan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengetahuan perempuan tentang pemilihan kepala desa. Perempuan yang memiliki akses dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses politik dan hak-hak mereka dalam pemilihan kepala desa, kemudian akses terhadap informasi yang relevan tentang pemilihan kepala desa sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan perempuan. Jika perempuan di Desa Ngadas memiliki akses terhadap sumber informasi seperti media massa, pertemuan masyarakat, seminar atau lokakarya terkait politik, mereka mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses pemilihan kepala desa dan peran mereka di dalamnya dan Pelatihan dan program pendidikan politik yang ditujukan khusus untuk perempuan di Desa Ngadas dapat membantu meningkatkan pengetahuan mereka tentang pemilihan kepala desa. Pelatihan semacam itu dapat memberikan pemahaman tentang proses pemilihan, hak-hak politik, pentingnya partisipasi, dan cara efektif untuk terlibat dalam proses politik. Penting untuk mengembangkan inisiatif yang mendorong peningkatan pengetahuan perempuan di Desa Ngadas terkait pemilihan kepala desa. Ini dapat melibatkan program pendidikan, pelatihan, kampanye informasi, dan akses yang mudah terhadap sumber-sumber informasi politik yang relevan. Dengan meningkatkan pengetahuan perempuan, mereka dapat memainkan peran yang lebih aktif dan berpengaruh dalam proses pemilihan kepala desa serta dalam pengambilan keputusan politik di tingkat desa. Berikut data klasifikasi tingkat pendidikan masyarakat desa Ngadas (Pramono, 2020).

Kelompok Pendidikan	Jumlah	Presentase
Masyarakat dengan buta huruf usia 10 tahun ke atas	0	0%
Masyarakat yang tidak tamat SD	79	4%
Masyarakat tamat SD	1.569	79%
Masyarakat tamat sekolah SMP	284	14%
Masyarakat tamat sekolah SMA	32	1,6%
Tamat Perguruan Tinggi/Akademi	12	0,6%
Jumlah Total	1.462	100%

Sumber: Data Administrasi Pemerintah Desa Ngadas

Persepsi perempuan Desa Ngadas dalam fenomena politik khususnya terkait pemilihan Kepala Desa

Persepsi perempuan terhadap fenomena politik dalam Pemilihan Kepala Desa Ngadas, Kabupaten Malang bisa bervariasi tergantung pada latar belakang, pengalaman, dan pandangan mereka. Namun, secara umum, ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi persepsi perempuan terhadap fenomena politik dalam konteks pemilihan kepala desa (Wahyuni, 2006). *Pertama*, kesadaran politik perempuan tentang pentingnya partisipasi dalam proses politik dapat

mempengaruhi persepsi mereka terhadap fenomena politik dalam pemilihan kepala desa. Jika perempuan memiliki pemahaman yang kuat tentang hak-hak politik mereka dan pentingnya pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan politik, mereka mungkin memiliki persepsi yang positif dan aktif terhadap proses politik. *Kedua*, tingkat partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala desa juga dapat memengaruhi persepsi mereka. Jika perempuan secara aktif terlibat dalam kampanye, berkomunikasi dengan calon kepala desa, dan terlibat dalam debat atau diskusi politik, mereka mungkin memiliki persepsi yang lebih positif tentang proses politik dan merasa diperhatikan dalam penentuan kebijakan dan keputusan politik.

Ketiga, Persepsi perempuan tentang representasi politik juga penting. Jika perempuan melihat adanya perwakilan yang adil dan inklusif dari perempuan dalam proses pemilihan kepala desa, mereka mungkin merasa lebih termotivasi untuk terlibat dan memiliki persepsi yang positif tentang kesempatan mereka untuk mempengaruhi kebijakan dan perubahan. *Keempat*, isu-isu gender dalam pemilihan kepala desa juga dapat mempengaruhi persepsi perempuan. Jika calon kepala desa dan isu-isu yang mereka ajukan memperhatikan isu-isu yang relevan dengan perempuan, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesetaraan gender, maka perempuan mungkin merasa lebih terhubung dengan proses politik dan memiliki persepsi yang lebih positif. *Kelima*, norma sosial dan budaya juga dapat memengaruhi persepsi perempuan terhadap fenomena politik. Jika perempuan hidup dalam lingkungan yang membatasi peran politik mereka, mungkin ada pembatasan dalam persepsi mereka terhadap peluang politik dan keterlibatan mereka dalam pemilihan kepala desa. Penting untuk diingat bahwa persepsi perempuan dapat bervariasi secara individual, dan ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi cara mereka memandang fenomena politik dalam pemilihan kepala desa. Upaya untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, representasi, dan pengaruh perempuan dalam politik dapat membantu menciptakan persepsi yang lebih positif dan inklusif terhadap fenomena politik dalam pemilihan kepala desa Ngadas, Kabupaten Malang.

Partisipasi Politik Perempuan Desa Ngadas dalam Dinamika Politik Desa Khususnya Agenda Pemilihan Kepala Desa

Partisipasi politik perempuan di desa Ngadas Kabupaten Malang pada dasarnya masih terpolarisasi dengan cukup ekstrem. Secara historis, kepemimpinan di Desa Ngadas yang dipimpin oleh kepala desa yang merangkap sekaligus menjadi kepala adat selalu diisi oleh laki-laki, walaupun perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk maju dalam pilkades. Namun, ketidakterpilihan calon perempuan menjadi tanda tanya besar terkait partisipasi politik perempuan desa Ngadas dalam dinamika politik di desa. Berdasarkan data kependudukan desa Ngadas di tahun 2010, tercatat Ngadas memiliki penduduk sebanyak 1879 jiwa, dengan jumlah 942 laki-laki dan 937 berjenis kelamin perempuan serta terdiri dari 479 Kepala Keluarga (KK). Memang jika dibandingkan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara jumlah penduduk Ngadas laki-laki dan perempuan, sehingga proporsinya seimbang. Namun, perbedaan peran perempuan dan laki-laki menjadi signifikan mengingat kepala keluarga dipimpin oleh laki-laki,

dan karena desa Ngadas termasuk desa adat yang menjunjung tinggi tradisi, mayoritas pemimpin pasti berasal dari kalangan laki-laki.

Melihat proses atau partisipasi perempuan di desa Ngadas jika mengacu pada Naqiyah (2005), yaitu yang didasarkan pada: 1) akses; 2) kontrol; dan 3) suara perempuan dalam perumusan kebijakan. Jika berdasarkan akses, hasil wawancara mengindikasikan bahwa peluang perempuan dan laki-laki untuk mengakses politik adalah sama. Hal ini ditunjukkan dengan perempuan yang diizinkan untuk mengikuti pemilihan kepala desa, sama halnya dengan laki-laki. Perempuan juga diperkenankan mengikuti berbagai agenda-agenda permusyawaratan desa. Sehingga dalam bidang akses, partisipasi perempuan ngadas terpenuhi. Selanjutnya, berdasarkan kontrol. Kontrol yang dimaksud dalam hal ini mengacu pada peranan perempuan dalam kebebasannya memberikan suara, atau maju menjadi calon dalam pemilihan kepala desa untuk memperoleh kontrol kekuasaan. Dalam ruang lingkup pemberian suara, perempuan di desa Ngadas diberikan kontrol seluas-luasnya untuk memilih tanpa adanya unsur paksaan. Minimnya desakan atau politik uang di desa Ngadas membuktikan bahwa tidak adanya paksaan dari calon kepala desa ke pada masyarakat yang akan memilih, termasuk ke perempuan. Terakhir, suara perempuan dalam perumusan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, perempuan memang diikutsertakan dalam proses perumusan kebijakan atau peraturan desa. Namun, terdapat beberapa perhatian khusus berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang diperoleh di lapangan yang menyiratkan bahwa perempuan yang bertindak sebagai penduduk biasa tanpa jabatan politik di desa, cenderung patuh dan manut terhadap keputusan yang diambil oleh kepala desa dan para pengurus lainnya termasuk sesepuh. Patuh dan tunduk yang dimaksud di sini adalah mereka cenderung percaya bahwa keputusan yang diambil oleh para pejabat desa merupakan keputusan yang terbaik bagi masyarakat desa Ngadas. Sehingga penolakan atau perdebatan tentang keputusan-keputusan yang ada sangat minim. Kondisi ini sebenarnya membawa dampak positif dan negatif bagi proses demokrasi dan partisipasi di tingkat desa. Secara positif, masyarakat yang selalu tunduk dan patuh terhadap aturan atau keputusan pemimpinnya berarti memiliki kepercayaan kuat dan legitimasi yang dimiliki sang pemimpin juga mengakar kuat. Sehingga keputusan-keputusan yang sifatnya urgen dapat dengan cepat diputuskan tanpa banyak perbedaan pendapat yang berpotensi memecah belah suara. Namun, di sisi lain kepatuhan akan penguasa secara terus menerus dapat berakibat kepada ketidakpekaan masyarakat akan kondisi politik yang ada di lingkungan sekitarnya. Selain itu, jika terus menerus dilakukan tanpa adanya kontrol kuat dari masyarakat, penyelewengan kekuasaan juga dapat muncul. Secara khusus bagi perempuan, jika enggan berpartisipasi secara aktif atau tidak bersuara terkait kepentingannya sebagai perempuan, posisi laki-laki yang telah mendominasi akan semakin kuat dan nantinya dapat berdampak pada peran perempuan yang semakin dikecilkan. Maka dari itu, peran partisipasi perempuan khususnya di desa Ngadas perlu kembali dikuatkan mengingat jumlah penduduk yang cukup lebih banyak daripada laki-laki memiliki potensi untuk memperkuat posisi dan kedudukan perempuan baik di ruang lingkup masyarakat ataupun di posisi-posisi politik seperti kepala desa dan pengurus desa.

KESIMPULAN

Perempuan Desa Ngadas memiliki persepsi yang beragam terkait fenomena politik, terutama dalam pemilihan kepala desa. Beberapa perempuan mungkin merasa tidak tertarik atau kurang percaya pada proses politik, sementara yang lain mungkin sangat peduli dan berpartisipasi secara aktif. Persepsi ini didasarkan pada berbagai faktor seperti pendidikan, pengalaman, dan latar belakang sosial-ekonomi perempuan tersebut. Dalam dinamika politik desa, perempuan Desa Ngadas menyadari pentingnya peran mereka dalam pengambilan keputusan politik di tingkat desa. Mereka menyadari bahwa keputusan yang diambil di tingkat desa berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka dan keluarga mereka. Oleh karena itu, sebagian besar perempuan desa Ngadas berpartisipasi dalam proses politik dengan cara yang beragam.

Partisipasi politik perempuan Desa Ngadas dalam agenda pemilihan kepala desa dapat meliputi mengikuti pertemuan-pertemuan kampanye, menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka kepada calon kepala desa, berdiskusi dan berdebat terkait isu-isu politik dengan warga desa lainnya, serta memberikan suara dalam pemilihan kepala desa. Seiring dengan tren global tentang peningkatan peran perempuan dalam politik, perempuan Desa Ngadas juga semakin berani untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa atau anggota dewan desa. Namun, meskipun partisipasi politik perempuan Desa Ngadas telah meningkat, masih ada tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam berperan secara aktif dalam politik desa. Beberapa hambatan tersebut termasuk keterbatasan akses terhadap pendidikan dan sumber daya, stereotip gender, budaya patriarki, dan sistem politik yang masih didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat setempat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung partisipasi politik perempuan yang lebih besar di tingkat desa.

Untuk mendorong partisipasi politik perempuan di Desa Ngadas, setidaknya ada beberapa cara yang dapat dilakukan, di antaranya:

- 1) Menjalankan pendidikan politik bagi para perempuan di Desa Ngadas. Hal ini dapat ditempuh dengan menjalin kerja sama antara desa Ngadas dengan KPU Kabupaten Malang juga instansi pemerintahan di Kabupaten Malang;
- 2) Membuka peluang bagi para perempuan penduduk asli Ngadas untuk masuk ke dalam institusi pemerintahan;
- 3) Mengikutsertakan perempuan Desa Ngadas mulai dari proses perencanaan atau perumusan kebijakan, tahap pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan; dan
- 4) Membuat kebijakan yang memberdayakan perempuan Desa Ngadas dari segi keterampilan, sehingga dengan berdaya, perempuan Desa Ngadas lebih mampu memposisikan diri sebagai partisipan aktif baik di lingkungan desa atau meluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawamenewi, A. (2019). IMPLEMENTASI HAK POLITIK WARGA NEGARA . *Jurnal Warta Edisi* , 43-67.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative Methods in Social Research*. New York: Mc Graw Hill.

- Garis, R. R., & Trisnia, T. (2021). PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA MUKTISARI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 171-180.
- Hanafie, H., & Azmy, A. S. (2018). *Kekuatan-kekuatan Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irawati, D. (2019). Tradisi Mayu, Mantra Damai Warga Tengger. *Kompas.Id*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/01/04/tradisi-mayu-mantra-damai-warga-tengger>
- Mali, F. X. (2019). *PENDIDIKAN POLITIK BERDASARKAN PANCASILA DALAM MENGHASILKAN ZON POLITICON INDONESIA YANG BERKARAKTER*. Cawang, Jakarta: UKI Pres.
- Marwan, M. (2004). *Pengantar Ilmu hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurbayan, & Tahir. (2019). Partisipasi Politik Perempuan (Studi pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima). *EduSociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 9-25.
- Pramono, E. (2020). *Local Economic Development pada Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Alam*. Retrieved from <https://eprints.umm.ac.id/59533/>
- Salusu, J. (2016). *Pengambilan Keputusan Strategis, Untuk Organisasi*. Jakarta: Grasindo.
- Stefen, K., Tejawati, N. L., & Parwati, N. P. (2022). Pandangan Politik Mohammad Hatta Pada Tahun Pada Tahun 1945-1956. *Jurnal Nirwasita*, 51-62.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (26th ed.). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Usman, H. (2016). *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahid, U. (2014). *Risalah Politik Perempuan (Media Massa dan Gerakan Counter Hegemony)*. Tangerang, Banten: Empat Pena Publishing.
- Wastiono, S. (1993). *Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya*. Bandung: Mekar Rahayu.
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK: SEBUAH KAJIAN TEORITIS. *Jurnal JISIPOL*, 126-142.
- Widjaj, H. (2008). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi T Dengan Tipologi Tradisional, T adisional, Transisional, dan Modern di Pr ansisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. *JURNAL POLITIK*, 232-270.